

**PENGARUH JUMLAH HOTEL, JUMLAH WISATAWAN,
PENDAPATAN PERKAPITA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN
2012-2016**



disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat tugas akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Evi Yunimartiningih
Nomor Mahasiswa : 13313089
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2017**



FORM REVIEW JURNAL PUBLIKASI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

Nama Mahasiswa : **EVI YUNIMIARTININGSIH**

No. Mahasiswa : **13313089**

Penelitian:

**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, PENDAPATAN PER KAPITA DAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-
2016**

Naskah Publikasi telah di review oleh Tim Penguji pada tanggal, 8 Februari 2018 dengan hasil *):

1. Layak dipublikasikan tanpa perbaikan
2. Layak dipublikasikan dengan perbaikan
3. Tidak layak dipublikasikan

Penguji,

Awan Setya Dewanta, Drs .,M.Ec.Dev.

Pembimbing,

Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Telah direvisi/diperbaiki tanggal :

Penguji,

Awan Setya Dewanta, Drs .,M.Ec.Dev.

Pembimbing,

Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

*) Coret yang tidak perlu

**PENGARUH JUMLAH HOTEL, JUMLAH WISATAWAN,
PENDAPATAN PERKAPITA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016**

Evi Yunimiartiningsih

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
e-mail : yunimiartiningsih@gmail.com

ABSTRAK

Era otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mandiri dalam melakukan pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilakukan daerah pastilah membutuhkan sumber pemasukan untuk melakukan pembangunan tersebut. Salah satu sumber pendapatan di daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah pada dasarnya merupakan komponen dari pendapatan Asli Daerah, jadi dengan banyaknya pendapatan dari pajak daerah maka semakin banyak pula pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah jumlah hotel, wisatawan, pendapatan perkapita dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada diprovinsi Jawa Timur. Adapun metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hotel memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap pendapatan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 dengan nilai t hitung sebesar -3.248 dan signifikansi $0,001 < 0,05$. Jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 dengan nilai t hitung sebesar 0.501 dan signifikansi $0,617 > 0,05$. Pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. dengan nilai t hitung sebesar 5,622 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Pendapatan regional domestik bruto tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 dengan nilai t hitung sebesar -0.197 dan signifikansi $0,844 > 0,05$.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Perkapita, PDRB

1. LATAR BELAKANG

Era otonomi daerah telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya dan penentuan sektor-sektor prioritas Daerah. Era otonomi secara sederhana adalah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Pendapatan daerah menurut UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Faktor yang berhubungan dengan peningkatan pajak daerah adalah jumlah hotel. Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Selanjutnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah kunjungan wisatawan. Menurut *World Tourism Organization* pengunjung (visitor) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjunginya (Antari, 2013).

Domanski dan Gwosdz (2010), menyatakan bahwa kunjungan pariwisata dapat menjadi *multiplier effect*. *Multiplier effect* dari kunjungan pariwisata dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu pertumbuhan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah atau pelayanan terhadap masyarakat. Itu berarti, jika dikaitkan dengan pariwisata di Jawa Timur dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Domanski dan Gwosdz terkait konsep *multiplier effect*nya, maka kita akan berbicara mengenai pajak dan pungutan-pungutan yang diambil dari tempat pariwisata yang ada di Jawa Timur. Industri pariwisata di Jawa Timur secara tidak langsung akan menimbulkan dampak yang signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan pajak daerah dan akan diteruskan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Itu berarti, semakin baik perkembangan industri pariwisata di Jawa Timur maka semakin banyak pajak yang bisa dipunguti oleh pemerintah daerah dan semakin banyak pula dana yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan memajukan regional tersebut, begitu pula sebaliknya.

Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah lainnya adalah pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita menurut Sukirno (2004) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Faktor lainnya adalah Produk Domestik Regional Bruto. PDRB menurut Purnastuti dan Mustikawati (2008) merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah regional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015), Arianto (2014) dan Marliyanti dan Arkadimana (2014) bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah karena apabila PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat (Nurcholis, 2007).

2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?

3. KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yang *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2013) bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011-2014. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa, variabel jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011-2014 sedangkan variabel jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang.

Kedua, penelitian yang dilakukan Aji (2013) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri dalam era desentralisasi fiskal dari tahun 2006-2011. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik tersambung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri, sedangkan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rakiman (2013) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pendapatan perkapita dan jumlah wajib terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari

penelitian ini adalah pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2013) bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kota Tegal selama 20 tahun pengamatan, yaitu sejak tahun 1991 sampai 2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, pembayar pajak, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Kota Tegal sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2010 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Tegal, sementara inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Tegal.

Keenam, adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Penelitian *ketujuh* Arianto (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, (2) inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah dan (3) PDRB berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya. Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa Pajak daerah dapat dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut.

4. LANDASAN TEORI

4.1 Penerimaan Daerah

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1999, bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, diantaranya :

- a. Dapat mengumpulkan pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat
- b. Melakukan pinjaman
- c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah
- d. Menambah tarif pajak negara tersebut
- e. Menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat

Menurut Nurcholis (2007:182) sumber pendapatan daerah adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

4.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2017 pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas maka penyusun menyimpulkan jika pajak daerah merupakan iuran yang diberbankan kepada orang atau badan yang dapat dipaksakan. Jadi pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan merupakan salah satu sumber pendapatan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

4.3 Jumlah Hotel

Hotel menurut Bataafi (2005) merupakan jenis akomodasi yang menggunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

4.4 Kunjungan Pariwisata

World Tourism Organization (WTO) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengunjung (visitor) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjungi (Antari, 2013).

Ada dua faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan menurut Hidayat (2011) yaitu:

1. Aspek Penawaran Pariwisata

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah *Attraction* (daya tarik), *Accesable* (transportasi), *Amenities* (fasilitas) dan *Ancillary* (kelembagaan). Sementara Smith, 1988 (dalam Pitana, 2005) mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang harus disediakan oleh daerah tujuan wisata menjadi enam kelompok besar, yaitu: (1) *Transportation*, (2) *Travel services*, (3) *Accommodation*, (4) *Food services*, (5) *Activities and attractions (recreation culture/entertainment)*, dan (6) *Retail goods*.

2. Aspek Permintaan Pariwisata

Permintaan pariwisata berpengaruh terhadap semua sektor perekonomian, perorangan (individu), Usaha Kecil Menengah, perusahaan swasta, dan sektor pemerintah (Sinclair dan Stabler, 1997). Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto, 2005), faktor-faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata adalah harga, pendapatan, sosial budaya, sosial politik, dan harga barang substitusi

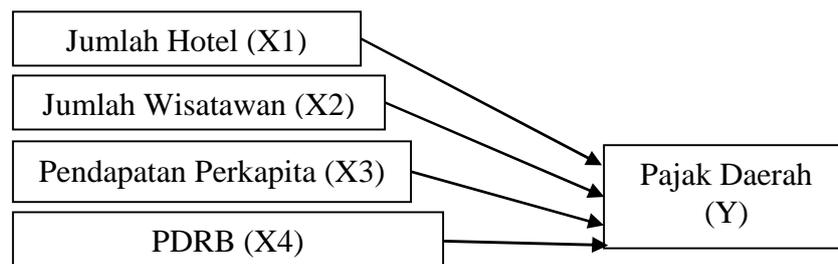
4.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita menurut Sukirno (2004: 423) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

4.6 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut BPS Jawa Timur (2017) Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektorsektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

5. KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Gambar Kerangka Pikir Penelitian

6. HIPOTESIS PENELITIAN

Sesuai dengan kerangka pikir di atas maka hipotesisnya sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah hotel dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016.
- b. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016.
- c. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan perkapita dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016
- d. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Domestik Regional Bruto dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016

7. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Peneliti mengambil data menurut waktu pengumpulannya, yaitu data panel. Data panel merupakan data gabungan antara *time series* dengan data *cross-sectional*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah wisatawan, pendapatan per kapita, dan penerimaan pajak daerah dari tahun 2013-2016.

Sampel dalam penelian ini terdiri dari Kab Pacitan, Kab Bangkalan, Kab Banyuwangi, Kab Blitar, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Gresik, Kab Malang, Kab Ngawi, Kab Sumenep, Kab Tulungagung, Kab Tuban, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Pekapita dan Produk Domestik Regional Bruto. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi data panel.

8. HASIL PENELITIAN

Data statistik dalam penelitian ini terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. Setelah dilakukan pengolahan statistik deskriptif dengan bantuan software SPSS 21 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Statistik Deskriptif

Deskriptif	Pajak Daerah	Jumlah Hotel	Jumlah Wisatawan	Pendapatan Perkapita	PDRB
Minimum	5.954.675.925	4	20.439	13.002.100	3.545.800.000.000
Maximum	3.000.152.510.888.000	175	20.438.755	157.730.200	451.535.900.000.000
Mean	121.533.144.307.224	34,611	2.076.466	37.598.692	51.135.221.176.471
Std. Deviation	554.022.262.268.407	40,285	3.783.095	28.023.782	84.672.651.210.800

Sumber: Data diolah (2017)

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa ada 84 data penelitian. Pada tahun 2012-2016 pajak daerah di provinsi Jawa Timur secara rata-rata adalah 121,5 T dengan pajak daerah terendah adalah di kabupaten Pacitan pada tahun 2012 yaitu

hannya sebesar 5 M. Adapun pajak daerah tertinggi adalah 3.000 T terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2016. Sementara itu jumlah hotel secara rata-rata adalah 34,611 dengan jumlah hotel terbanyak ada di kota surabaya dengan jumlah hotel 175 hotel dan paling sedikit ada di kabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 4 hotel.

Jumlah wisatawan di provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2012-2016 rata-rata 2.07 Juta, jumlah wisatawan tertinggi terjadi di Kota Surabaya dengan jumlah wisatawan sebanyak 20.43 Juta pada tahun 2016. Adapun jumlah kunjungan wisata terendah terjadi di kabupaten Pasuruan dengan jumlah pariwisatawan sebanyak 20,4 Ribu yang terjadi pada tahun 2012. Sementara itu pendapatan perkapita pada tahun 2012-2016 di privinsi Jawa Timur secara rata-rata 37,5 Juta dengan pendapatan perkapita tertinggi adalah sebesar 157 Juta di kota Surabaya tahun 2016. Sementara itu tingkat pendapatan perkapita terendah adalah di kabupaten Ngawi pada tahun 2012 dengan jumlah pendapatan perkapita hanya 13.002 Juta.

Adapun pada variabel PDRB secara rata-rata adalah 51.1 T, dengan PDRB terbesar adalah 451.5 T di kota Surabaya pada tahun 2016. Sementara PDRB terendah adalah sebesar 3.5 T yaitu pada daerah Kota Blitar pada tahun 2012

Setelah dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Kesesuaian Model

Variabel Y	Uji Model	Hasil	Kesimpulan
Pajak Daerah	<i>Chow Test (Common effect or fixed effect)</i>	0.000	<i>Fixed Effect</i>
	<i>Hasuman Test (fixed effect or Random effect)</i>	0.0249	<i>Random Effect</i>

Sumber: Data diolah (2017)

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang sesuai dalam penelitian ini adalah model *random effect*. Kesimpulan ini diperoleh dari serangkaian pengujian yang dilakukan yaitu uji *chow test*. Dari uji *chow test* diperoleh hasil bahwa model yang baik dari penelitian ini adalah *fixed effect*. Pada hasil uji *hasuman test* hasilnya menyimpulkan bahwa model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model estimasi *fixed effect*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.32375	25.60874	1.223166	0.2258
LNJH?	-1.890351	0.581852	-3.248852	0.0018
LNJW?	0.075056	0.149675	0.501460	0.6178
LNPPK?	1.01E-07	1.79E-08	5.622649	0.0000
LNPDRB?	-0.170695	0.865960	-0.197116	0.8444
Fixed Effects (Cross)				
_KAB_PACITAN—C	-0.269790			
_KAB_BANGKALAN—C	-2.565142			
_KAB_BANYUWANGI—C	2.878101			
_KAB_BLITAR—C	0.627200			
_KAB_BOJONEGORO--C	-0.573755			
_KAB_BONDOWOSO--C	-0.150504			
_KAB_GRESIK—C	-2.574010			
_KAB_MALANG—C	4.689016			
_KAB_NGAWI—C	-0.202941			
_KAB_SUMENEP--C	-1.446275			
_KAB_TULUNGAGUNG--C	0.925748			
_KAB_TUBAN—C	0.711509			
_KOTA_BLITAR--C	-1.807532			
_KOTA_MALANG--C	2.039065			
_KOTA_MOJOKERTO--C	-2.675904			
_KOTA_PASURUAN--C	-3.034495			
_KOTA_SURABAYA--C	3.429710			
Effects Specification				
R-squared	0.958536	Mean dependent var		25.14486
Adjusted R-squared	0.945578	S.D. dependent var		2.587898
S.E. of regression	0.603717	Akaike info criterion		2.038928
Sum squared resid	23.32636	Schwarz criterion		2.642406
Log likelihood	-65.65443	Hannan-Quinn criter.		2.281664
F-statistic	73.97499	Durbin-Watson stat		2.154318
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Uji dengan *E-Views 7.0*

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar -3.248 dengan sig. t sebesar 0.001 ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menerima H_0 dan menolak H_a . Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah hotel terhadap pendapatan pajak di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar 0.501 dengan sig. t sebesar 0.617 ($p > 0,05$), sehingga keputusannya menerima H_0 dan menolak H_a . Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah wisatawan terhadap pendapatan pajak di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar 5.622 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menolak H_0 dan menerima H_a . Berarti ada pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel pendapatan perkapita terhadap pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar -0.197 dengan sig. t sebesar 0,844 ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menerima H_0 dan menolak H_a . Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan perkapita dengan pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

9. PEMBAHASAN

9.1. Pengaruh Jumlah hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar -3.248 dengan sig. t sebesar 0.001 ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menolak H_0 dan menolak H_a . Berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah hotel terhadap pendapatan pajak di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah hotel maka pendapatan dari pajak daerah akan mengalami penurunan. Hasil ini tentunya menolak hipotesis yang ada, dimana jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

Hasil penelitian ini tentunya bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2013), dimana jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011-2014. Jumlah hotel berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah ini menunjukkan jika jumlah hotel yang banyak belum tentu dapat meningkatkan pendapatan hotel yang banyak pula.

9.2. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil pengujian membuktikan jika jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar -0.039 dengan signifikansi 0,617 >

0,05. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut bahwa jumlah wisatawan baik asing ataupun domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah dengan arah pengaruh negatif. Arah pengaruh positif mengindikasikan semakin banyak jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Timur maka akan berakibat terjadinya peningkatan pendapatan pajak daerah, begitu juga sebaliknya. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji (2013) yang membuktikan jika jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.

9.3. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil analisis penelitian membuktikan jika ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan perkapita dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 5,622 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak daerah dengan di Provinsi Jawa Timur. Arah positif ini menunjukkan jika perubahan nilai variabel pendapatan perkapita akan searah dengan perubahan nilai pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Rakiman (2013) serta penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2013) yang membuktikan jika pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi pendapatan perkapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

9.4. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil analisis penelitian membuktikan jika tidak ada pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar -0.197 dengan signifikansi $0,844 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Arah negatif ini menunjukkan jika PDRB di

Jawa Timur mengalami peningkatan maka akan menurunkan pendapatan pajak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

Hasil penelitian ini berlainan dengan penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015), Arianto (2014) dan Marliyanti dan Arkadimana (2014) bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh negatif dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah karena apabila PDRB suatu daerah meningkat belum tentu keinginan untuk membayar pajak juga mengalami peningkatan bahkan ada yang cenderung menggunakan pendapatannya untuk modal usaha dan yang lainnya.

10. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah negatif mengindikasikan jika ada kenaikan jumlah hotel akan berakibat terjadinya penurunan penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur.
2. Jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah positif mengindikasikan jika ada kenaikan jumlah wisatawan akan berakibat terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur.
3. Pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah positif menunjukkan jika perubahan nilai variabel pendapatan perkapita akan searah dengan perubahan nilai pendapatan pajak daerah.
4. Pendapatan regional domestik bruto tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah negatif ini mengindikasikan perubahan nilai variabel PDRB akan bertentangan dengan perubahan nilai pendapatan pajak daerah.

11. IMPLIKASI

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah maka pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur sebaiknya meningkatkan pendapatan masyarakat perkapita terdahulu. Hal ini dikarenakan dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat maka dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2. Pendapatan regional bruto terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di provinsi Jawa Timur. Dengan demikian maka pemerintah perlu memberikan stimulus agar potensi ekonomi yang ada di provinsi Jawa Timur dapat dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan domestik regional bruto yang meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama yang berasal dari sektor pajak.
3. Jumlah wisatawan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan maka dapat mengurangi pajak daerah. Hal ini tentunya bertentangan dengan kondisi normal bahwa semakin banyak jumlah wisatawan seharusnya dapat meningkatkan pajak melalui pajak hotel dan pajak reklame, pajak hiburan dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini ada indikasi jika ada pihak-pihak yang menyembunyikan pendapatannya, sehingga perlu pengawasan yang ketat terhadap para pengelola objek wisata dan perusahaan penunjukan periwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustiningtyas, Veronika Winarti. 2003. “*Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah (tahun 1998 - 2001)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Aji, Anggit Darmastuti. 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Era Desentralisasi Fiskal”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Aji, Bayu Purnomo dkk. 2015. Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng”, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 3 Tahun 2015)
- Aliandi, Vidya D.A dan Herniwati Retno Handayani. 2013. “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)” *Diponegoro Journal Of Economics* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Hal, 1-14
- Anggraini, Yunita dan Puranto Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja; Penyusunan. APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM
- Antari, Ni LS. 2013. “Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar” *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Agustus 2013, Vol.3 No.1 hal.36
- Arianto, Puspita Suci. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 1 (2014)
- Arifin, Imamul. 2007. *Membukan Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariyanto, 2005, *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Rineka Cipta

- Badrudin. 2001. “Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata”. *Jurnal Kompak*. No. 3. Hal. 1-13
- Bambang W. dan Aristanti. 2007. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Raya
- BPS Jawa Timur. 2017. Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2017. Diakses dari https://jatim.bps.go.id/4dm!n/pdf_publicasi/Provinsi-Jawa-Timur-Dalam-Angka-2017.pdf.
- Darise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*. Jakarta: Indeks
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Desmiwati. 2010. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh Di Indonesia (Analisis Upah Minimum Propinsi Tahun 2001-2008). *Tesis*. Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia
- Digdaya, Asep Putra (2015) Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013). *Skripsi*. Universitas Stikubank.
- Dimiyati, Adim. 2004. *Mendorong Perekonomian Dengan Pariwisata*. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Volume 1 (Nomor 1). Tahun 2004, hlm. 17-22
- Domaski B. and Gwosdz K. 2010. “Multiplier Effects In Local and Regional Development”. *Quaestiones Geographicae* 29 (2), Adam Mickiewicz University Press, Pozna 2010, pp. 27-37.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia/* Yogyakarta: Penerbitan Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2001. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar. Penyunting: Sumarno Zain*, Jakarta: Erlangga
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta : Andi
- Halim, Abdul, Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

- Haniz, Nadya Fazriana dan Hadi Sasana. 2013. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota tegal”. *Journal of economics* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-13
- Hidayat, Wahyu. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisata di Taman Nasional Way Kambas Propinsi Lampung”. *Tesis*. Universitas Indonesia
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marliyanti, Dwi Sundi dan Sudarsana Arka. 2014. “Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar”, *E-Jurnal EP Unud*, 3 [6] : 265-271
- Murib, Pidelis dkk. 2016. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
- Nordiawan, Deddi dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Nurrohman, Alfian. 2010. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Peraturan Gubernur (Pergub) No. 8 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Purnastuti, Losina dan Rr. Indah Mustikawati. 2008. *Ekonomi untuk SMA/MA. Kelas XI*. Jakarta: Grasindo.
- Rafsanjani, Fachry Ali. 2015. “Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran, dan Pendapatan Per Kapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Studi Pada Badan Pusat Statistik Dan Dinas Pendapatan

Daerah Kota Batu Periode Tahun 2004-2013)", *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol 6, No 2 (2015)

Rakiman. 2013. "Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajibpajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Periode 2002-2010", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Eonomi* , Vol 9, No 3 tahun 2013, hal 77-87

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". *Makalah*. Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dalam Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002

Sihotang, Yeppy dkk. 2015. "Kaitan Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 – 2013", *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VII No.1 April 2015

Sinclair, M. Thea dan Stabler, Mike. 1997. *Economics of Tourism*. London: Rout Ledge

Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Aplikasi Kinerja Bank Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Tendean, Jesica C dkk. 2014. "Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening Variabel", Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5651/5183>. Tanggal 30 oktober 2017

Trikunawaningsih dan Antyo Pracoyo. 2005. *Aspek dasar ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 tahun 1999. Tentang. Perimbangan keuangan antara. Pemerintah pusat dan daerah
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonosia
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Wijaya, Ida B.A.B dan I Ketut Suidiana. 2016. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 5, No. 12 Desember 2016*
- Winarno, Wing Wahyu, 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wulandari, Yesi D dkk. 2013. “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)”, diakses dari <http://eprints.mdp.ac.id/1830/1/JURNAL-2012210021.pdf>
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas